



**Analisis Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Daerah  
Sektor Infrastruktur, Sektor Pertanian, Sektor Pariwisata  
dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Pertumbuhan Ekonomi  
Nusa Tenggara Barat (NTB) Tahun 2011-2015**

**Husriatun Putri**

Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

**Kata Kunci**

Economic Growth,  
Local Government  
Expenditure, Local  
Own Revenues  
(LOR), and Panel  
Data

**Abstrak**

This study aims to determine the effect of local government expenditure on agriculture, tourism, road infrastructure and local own revenues (LOR) on economic growth in province of Nusa Tenggara Barat by district/city period 2011-2015. The method is used to analyze the research data is panel data, fixed effect model by using an application help Eviews 8.

The result of this research is government expenditure variable for agriculture sector has a positive and significant influence on economic growth, government expenditure for tourism sector has a negative and insignificant effect on economic growth, government expenditure for road infrastructure has a negative and insignificant effect on economic growth and local own revenues (LOR) has a positive and significant influence on economic growth.

*Korespondensi: Husriatun Putri*

*Email: Husriatunputri@gmail.com*

## PENDAHULUAN

Pertumbuhan ekonomi adalah proses kenaikan output per kapita dalam jangka panjang yang terdiri dari tiga aspek yaitu

proses, output per kapita, dan jangka panjang (Boediono, 1988).

**Tabel 1.1.** Laju Pertumbuhan Ekonomi ADHK 2010 menurut kab./kota NTB

Kabupaten/Kota	Laju Pertumbuhan Ekonomi Menurut Kab./Kota (Persen)				
	2011	2012	2013	2014	2015
Kabupaten Lombok Barat	6,05	5,27	5,26	5,7	6,39
Kabupaten Lombok Tengah	10,89	13,7	6,24	6,28	5,58
Kabupaten Lombok Timur	6,23	5,43	5,51	4,8	5,94
Kabupaten Sumbawa	6,97	6,67	6,44	6,63	6,43
Kabupaten Dompu	7,2	6,18	5,05	5,54	6,16
Kabupaten Bima	6,05	5,95	5,11	6,01	6,27
Kabupaten Sumbawa Barat	-28,2	-26,3	3,53	-1,3	107
Kabupaten Lombok Utara	5,34	4,08	4,11	4,59	4,73
Kota Mataram	2,96	1,04	7,95	8,10	7,99
Kota Bima	5,12	5,6	5,58	5,89	5,76
<b>Nusa Tenggara Barat</b>	<b>-3,91</b>	<b>-1,54</b>	<b>5,16</b>	<b>5,17</b>	<b>21,8</b>

Sumber: Badan Pusat Statistik, NTB

Persentase pertumbuhan ekonomi NTB dari tahun 2011 hingga 2015, pertumbuhan ekonominya fluktuatif (lihat tabel 1.1) hal ini berasal dari turunya pertumbuhan ekonomi secara drastis di Kabupaten Sumbawa Barat hingga minus pada 2011 hingga 2012, kontribusi PDRB Sumbawa Barat paling dominan berasal dari pertambangan dan penggalian. Oleh karena itu, ketika terjadi penurunan produksi pada sektor tersebut, pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan (regional) juga menurun.

Kecenderungan bergantung pada satu sektor ekonomi saja, membuat pertumbuhan ekonomi menjadi tidak stabil, Rendahnya pertumbuhan ekonomi, membuat produktivitas marginal penduduknya rendah. Ini berarti penambahan penggunaan tenaga kerja tidak meningkatkan produksi nasional justru

pendapatan per kapita menurun yang menyebabkan kemerosotan kesejahteraan masyarakat (Sukirno, 2004).

Penyebab lain rendahnya pertumbuhan ekonomi adalah fasilitas infrastruktur yang belum memadai. Infrastruktur jalan, masih menjadi keluhan masyarakat Sumbawa, karena jika dibandingkan dengan Lombok infrastruktur di Sumbawa terbilang jauh tertinggal yakni Sumbawa, antara 12,6 hingga 51,44 persen. Sedangkan Lombok dengan tingkat kemantapan jalan kota/kabupaten 37,83 hingga 71,55 persen (Lombok Post, 2017).

Pemerintah dalam mengelola kekayaan alam dan menyediakan fasilitas pembangunan, oleh karena itu bentuk intervensi pemerintah dalam mendorong pembangunan ekonomi adalah melalui kebijakan fiskal. Tujuan dari kebijakan fiskal adalah menstabilkan harga tingkat

output, memperlebar kesempatan kerja dan menstimulasi pertumbuhan ekonomi (Anitasari & Soleh, 2015). APDB memiliki peran sebagai otoritas, perencanaan, mengawasi, alokasi, distribusi dan stabilisasi Bastian dalam (Basuki, 2016).

Dalam rangka mendukung pengembangan ekonomi di Indonesia pemerintah membuat kebijakan pengembangan otonomi daerah. Melalui otonomi daerah, dapat mengoptimalkan pengelolaan kemampuan sumber daya alam

dan manusia di masing-masing daerah sesuai dengan kemampuan masing-masing daerah, NTB selaku salah satu daerah otonom, juga mengupayakan pengembangan potensi ekonomi wilayahnya. Ini merupakan salah satu cara agar pelaku ekonomi berperan aktif dan mampu memberikan kontribusi bagi pertumbuhan ekonomi nasional maupun regional dan juga. Di bawah ini merupakan PDRB NTB menurut lapangan usaha

**Tabel 1.2**  
**PDRB NTB ADHK 2010 Menurut Lapangan Usaha (Juta Rupiah)**

Lapangan Usaha PDRB	PDRB Provinsi Nusa Tenggara Barat			
	ADH Kontan 2010 (Juta Rupiah)			
	2011	2012	2013	2014
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	15,691,914	16,407,442	16,946,743	17,702,366
Pertambangan dan Penggalan	14,709,393	10,788,742	11,254,503	11,238,698
Industri Pengolahan	3,277,041	34,148,735	35,395,368	3,658,662
Konstruksi	6,139,781	63,663,067	66,969,633	7,219,308
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Sepeda Motor dan Mobil	7,662,944	83,931,033	90,526,635	9,747,296
Transportasi dan Pergudangan	4,427,516	4,717,941	49,639,827	5,335,371

Sumber: Badan Pusat Statistik, NTB

Sejak tahun 2011 hingga 2014 sektor pertanian merupakan pendorong PDRB paling dominan, akan tetapi pertumbuhannya cenderung lambat dari tahun ke tahun. Sektor pertanian memegang peranan dalam meningkatkan perekonomian, Pada tahun 2013 penyerapan tenaga kerja di NTB didominasi oleh sektor pertanian yakni sebesar 45,02 persen (Badan Pusat Statistik NTB, 2013). Seperti yang disampaikan oleh Presiden pemerintahan yang sekarang,

bahwa perekonomian NTB saat ini disokong oleh sektor pertanian dengan kontribusi sebesar 24,14 persen. Sektor pertanian sangat krusial untuk diperhatikan oleh pemerintah melalui pengeluaran pemerintah, serta faktor pendukung pengembangan sektor pertanian yakni, infrastruktur sebagai akses utama dalam pendistribusian hasil pertanian.

Kesiapan Sektor infrastruktur juga penting dalam menunjang aktivitas perekonomian. Sektor infrastruktur

berkesinambungan dengan sektor-sektor lain, dalam menyokong kelancaran aktivitas perekonomian. Dalam rangka mempercepat pembangunan di NTB, Pemerintah daerah melakukan pembangunan Infrastruktur diberbagai aspek, dipaparkan juga dalam RPJMD NTB (2013-2018), infrastruktur menjadi salah satu prioritas pembangunan di NTB. Hal ini berkaitan dengan target pertumbuhan ekonomi sebesar 5,90%, menurunkan angka kemiskinan menjadi 16,25%, tingkat pengangguran terbuka 3,5%, inflasi 2,77% dan indeks gini rasio 0,273%. (WartaNTB.com, 2017).

Dampak positif terhadap peningkatan pengeluaran pemerintah adalah semakin meningkatnya aktivitas ekonomi, yang mana meningkatnya juga aliran Pendapatan Asli Daerah (PAD). Susanto (2014), melakukan penelitian tentang analisis kemampuan keuangan daerah pemerintah Provinsi NTB, hasil penelitiannya adalah berdasarkan pengukuran Indeks Kemampuan Keuangan (IKK) dan klasifikasi kriteria tingkat keuangan daerah Provinsi NTB memiliki kemampuan keuangan yang tinggi. Melihat dari potensi sumber daya alam yang dimiliki NTB, peluang meningkatkan PAD dapat dimanfaatkan secara optimal.

Pengembangan sektor pariwisata menjadi perhatian publik di NTB, setelah mendapatkan predikat wisata halal terbaik di dunia tahun 2015 dan 2016. Tidak hanya itu, NTB juga dinobatkan sebagai wisata tempat bulan madu halal terbaik di dunia tahun 2016. Hal ini pantas diraih oleh NTB, karena Pulau Lombok merupakan bagian dari NTB dikenal sebagai Pulau Seribu Masjid, dan juga mayoritas masyarakat NTB pemeluk agama islam. Faktor pendukung lainnya yang menarik di NTB adalah keindahan Alamnya, keunikan seni

budaya, aneka makanan tradisional, serta keramah tamahan masyarakatnya (Media Republika.co.id, 2017).

Dalam Buku Agenda Pembangunan Nasional tentang Rencana Pembangunan Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019, ada empat langkah konkret untuk mendorong terciptanya kesempatan kerja yang berkualitas, yakni: (a) meningkatkan produktivitas, melalui akslerasi penyerapan tenaga kerja ke industri yang memberikan nilai tambah dan berproduktivitas tinggi akan membuka peluang kesempatan kerja selebar lebarnya, termasuk sektor pertanian melalui sektor pengelolaan industri; (b) meningkatkan standar hidup pekerja, tidak terkecuali pekerja miskin melalui penyediaan lapangan kerja produktif; (c) transformasi struktur tenaga kerja, hal ini dapat dilakukan dengan dukungan fasilitas seperti infrastruktur pengembangan kompetensi untuk pekerja yang dapat meningkatkan *skill* di bidang industri; (d) memberikan insentif bagi investasi yang menciptakan padat karya hal ini berlaku juga untuk pelaku usaha kecil-menengah.

Melalui otonomi daerah diharapkan mampu untuk menggali potensi sumber daya yang dimiliki NTB, sehingga akan mencapai tujuan pembangunan ekonomi, dengan pengoptimalan pengelolaan daerah disektor-sektor yang berpotensi yang akhirnya akan menciptakan kemandirian ekonomi suatu daerah. Dengan harapan melalui penelitian ini mampu membuktikan variabel-variabel diatas dapat memberikan pengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi, sehingga dapat mecapai tujuan pembangunan ekonomi kesejahteraan dan keadilan. Berdasarkan uraian paparan pada latar belakang, tujuan dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaruh pengeluaran pemerintah sektor

infrastruktur terhadap pertumbuhan ekonomi NTB tahun 2011-2015

2. Untuk mengetahui pengaruh pengeluaran pemerintah sektor Pertanian terhadap pertumbuhan ekonomi NTB tahun 2011-2015
3. Untuk mengetahui pengaruh pengeluaran pemerintah disektor pariwisata terhadap pertumbuhan ekonomi NTB tahun 2011-2015
4. Untuk mengetahui pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap pertumbuhan ekonomi tahun 2011-2015

## TINJAUAN PUSTAKA

### Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi adalah proses kenaikan output per kapita dalam jangka panjang yang terdiri dari tiga aspek yaitu proses, output per kapita, dan jangka panjang (Boediono, 1988). Kuznet dalam (Todaro, 2000) mendefinisikan pertumbuhan ekonomi sebagai kenaikan kapasitas dalam jangka panjang dari negara yang bersangkutan untuk menyediakan berbagai barang ekonomi kepada penduduknya. pertumbuhan ekonomi merupakan proses memperlebar kapasitas dengan penambahan output per kapita melalui investasi yang memperbaiki kualitas baik sumber daya manusia maupun modal sehingga bisa menambahkan pendapatan yang merupakan imbal balik dari hasil faktor produksi. Sedangkan pembangunan adalah usaha meningkatkan kualitas hidup suku bangsa dengan menggunakan tolak ukur tinggi rendahnya pendapatan riil per kapita (Sukirno, 1996).

Ahman & Indriani (2007), mengatakan tingkat kemajuan perekonomian di suatu negara dapat diukur dengan angka pertumbuhan ekonomi yang

sudah diperoleh suatu wilayah selama satu tahun.

### Pengeluaran Pemerintah

Pengeluaran pemerintah setiap tahun selalu meningkat, di hampir seluruh macam kegiatan ekonomi. Semakin besar peran pemerintah maka semakin besar pula pengeluarannya dalam proporsi pendapatan nasional. Dalam hubungan ini, Adolph Wagner mengemukakan hukum yang disebut dengan "*Law of ever increasing state activity*". (hukum tentang kegiatan pemerintah selalu meningkat). (Suparmoko, 2000)

Menurut Todaro (1998) ada dua manfaat berkembangnya kebijakan perpajakan yaitu : (1) konsensi pajak dan insentif fiskal yang sama dianggap sebagai pendorong bagi perusahaan swasta. Setiap persetujuan dan dorongan pajak ditawarkan kepada investor swasta asing untuk menanamkan modalnya di perusahaan negara negara berkembang; dan (2) memobilisasi sumber daya untuk pengeluaran pemerintah, kemampuan pemerintah dalam meningkatkan kemajuan ekonomi dan sosialnya tergantung dari biaya pengembangan program-program pelayanan umum yang sangat penting bagi masyarakat.

### Pembangunan dan Pengeluaran Sektor Infrastruktur

Kodoatie dalam Prasetyo & Firdaus, (2009) mengartikan infrastruktur sebagai fasilitas-fasilitas fisik yang dikembangkan oleh agen publik yang dilakukan pemerintah dalam penyediaan fasilitas publik berupa penyediaan air, tenaga listrik, pembuangan limbah, transportasi dan pelayanan-pelayanan lainnya untuk tujuan ekonomi sosial. *The World Bank* (1994), mengklasifikasikan infrastruktur menjadi tiga, yaitu:

- 1) Infrastruktur ekonomi adalah Infrastruktur berupa fisik untuk menunjang kegiatan ekonomi, terdiri dari (*public utilities*) tenaga kerja, gas, air, sanitasi, telekomunikasi, (*public work*) jalan, bendungan, kanal, irigasi dan drainase (*transportation sector*) jalan, rel, pelabuhan, lapangan terbang dan lain sebagainya.
- 2) Infrastruktur sosial, yang termasuk dalam katagori ini adalah Pendidikan, kesehatan dan perumahan.
- 3) Infrastruktur administrasi terdiri dari penegakan hukum, control administrasi dan koordinasi.

Dalam kehidupan sehari-hari infrastruktur merupakan pendukung utama fungsi-fungsi sistem sosial dan sistem ekonomi. Ketersediaan infrastruktur dapat menunjang proses pelaksanaan kegiatan ekonomi. Manfaat ketersediaan infrastruktur dalam perekonomian sangat membantu dalam kegiatan pertanian, industri, perdagangan dan juga mengefisienkan masyarakat dalam melakukan aktivitas ekonomi.

### **Pembangunan dan Pengeluaran Sektor pertanian**

Suatu strategi pembangunan yang dilandaskan pada prioritas pertanian dan ketenagakerjaan paling tidak membutuhkan tiga unsur pelengkap dasar, yaitu: *pertama*, percepatan pertumbuhan output melalui serangkaian adaptasi teknologi, institusional dan insentif harga yang khusus dirancang untuk meningkatkan produktivitas para petani kecil. *Kedua*, meningkatkan permintaan domestik terhadap output pertanian yang didasarkan pada strategi pembangunan perkotaan yang berorientasi pada pembinaan ketenagakerjaan. Dan *ketiga*, diversifikasi kegiatan pembangunan pedesaan padat karya *non*-pertanian baik secara langsung maupun tidak langsung akan

saling menunjang oleh masyarakat pertanian.(Todaro, 2000).

### **Pembangunan dan Sektor Pariwisata**

Keberadaan pariwisata dalam suatu wilayah akan memberikan kontribusi terhadap perekonomian, sehingga pemerintah memiliki peran dalam peningkatan pariwisata. Sektor Pariwisata bukan industri yang berdiri sendiri, akan tetapi didukung oleh beberapa sektor ekonomi terkait. Oleh karena itu, untuk mengetahui peranan sektor pariwisata dalam perekonomian nasional tidak dapat dilakukan secara langsung, peranan itu diperoleh melalui identifikasi semua sektor ekonomi yang terkait dengan pariwisata, seperti perikanan, pertanian, berbagai macam industri pangan, hotel, tekstil dan lain-lain (Hermawan, 2012).

Biasanya parawisatawan akan banyak membelanjakan uangnya untuk transportasi, makanan dan minuman, cinderamata dan hal-hal yang berkaitan dengan kebutuhan pada saat melakukan perjalanan di pariwisata. Hal ini dapat membuka peluang bagi pelaku usaha mulai dari kecil hingga pelaku usaha besar. Oleh karena itu, semakin banyak fasilitas yang memadai dalam sektor pariwisata akan semakin meningkatkan peminatnya.

### **Pendapatan Asli Daerah (PAD)**

Menurut undang-undang nomor 33 tahun 2004 definisi Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan asli daerah yang bersumber dari; (a) hasil pajak daerah; (b) hasil retribusi Daerah; (c) hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; (d) dan Lain-lain PAD yang sah. Dalam rangka untuk memberikan kebebasan kepada daerah untuk menggali pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai bentuk wujud dari asas desentralisasi.

Peningkatan PAD menunjukkan bentuk partisipasi masyarakat terhadap

program pemerintah di daerah terkait, PAD yang tinggi dapat meningkatkan pembiayaan pengeluaran pemerintah di berbagai sektor dan percepatan pembangunan ekonomi. Hubungan fungsional antara PAD dan PDRB. Peningkatan PDRB artinya penerimaan daerah juga meningkat. Hal ini dapat dimanfaatkan untuk menambah pembiayaan untuk program-program pembangunan daerah. Maka pelayanan kepada masyarakat juga dapat di tingkatkan Santoso dan Rahayu dalam (Rani, 2016).

## **METODE PENELITIAN**

### **Jenis dan Sumber Data**

Data ini menggunakan data panel merupakan gabungan antara data *cross section* dengan *time series*. Peneliti memperoleh data dengan cara *library seacrh* dan *internet search*. Sumber data dari Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan dan BPS NTB per kabupaten/kota. Terdiri dari variabel dependen yakni Pertumbuhan ekonomi yang diproksikan menggunakan PDRB periode 2011-2015. Dan variabel independen terdiri dari pengeluaran pemerintah untuk sektor pertanian, pariwisata, infrastruktur jalan dan PAD periode 2011-2015 semua variabel dalam satuan juta.

### **Metode Analisis Data**

metode analisis menggunakan data panel, sedangkan alat analisis dengan

menggunakan aplikasi *eviews* 8.0. Data panel merupakan gabungan data *time series* dan *cross section*. Data *time series* berupa data tahunan meliputi tahun 2011-2015. Sedangkan data *cross section* berupa kabupaten-kabupaten atau kota NTB terdiri dari Lombok Barat, Lombok Tengah, Lombok Timur, Sumbawa, Dompu, Bima, Sumbawa Barat, Lombok Utara, Kota Mataram dan Kota Bima.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Uji Asumsi Klasik**

Uji ini dilakukan untuk mengetahui penyimpangan-penyimpangan asumsi klasik yang terjadi dari hasil penelitian. (Basuki & Yuliadi, 2015).

#### **1. Uji Heteroskedastisitas**

Uji heteroskedastisitas dilakukan dengan menggunakan uji Park. Uji Park pertama kali dikembangkan oleh Park pada tahun 1996. Menurutnya, masalah munculnya heteroskedastisitas karena tergantung dari variabel independen yang ada di dalam model Widarjono dalam (basuki & Yuliadi, 2015). Heteroskedastisitas merupakan masalah regresi yang faktor gangguan tidak memiliki varian yang sama atau yang tidak konstan.

**Tabel 5.1**

Heteroskedastisitas (Uji Park)

<b>Variable</b>	<b>Probabilitas</b>
C	0.3933
LOG(PERTANIAN?)	0.3082
LOG(PARIWISATA?)	0.1772
LOG(JALAN?)	0.3904
LOG(PAD?)	0.2381

Sumber: Lampiran, data diolah

Probabilitas dari uji heteroskedastisitas adalah lebih besar dari 0,05 artinya data yang digunakan sebagai variabel independen terbebas dari masalah heterokedastisitas.

## 2. Uji Multikolinearitas

Tujuan dari uji ini adalah untuk menguji ada atau tidaknya korelasi

variabel-variabel penjelas dalam persamaan regresi. Aturan dari metode ini adalah jika nilai koefisien diatas 0,9. Maka diduga adanya multikolinieritas dalam model, sebaliknya jika koefisien cukup rendah maka model diduga tidak mengandung multikolinieritas. Ajija *atal* dalam (Basuki & Yuliadi, 2014).

**Tabel 5.2**  
Multikolinearitas (*Corellation Test*)

Variabel	LOG (PDRB)	LOG (JALAN)	LOG (PAD)	LOG (PARIWI SATA)	LOG (PERTANIAN)
LOG(PDRB)	1.	0.418749	0.772398	0.367494	0.363873
LOG (JALAN)	0.418749	1.	0.412038	0.344010	0.630458
LOG (PAD)	0.772398	0.412038	1.	0.485896	0.519418
LOG (PARIWISATA)	0.367494	0.344010	0.485896	1.	0.242807
LOG (PERTANIAN)	0.363873	0.630458	0.519418	0.242807	1.

Sumber: Lampiran, data diolah

Berdasarkan hasil uji multikolinearitas, nilai semua variabel lebih kecil dari 0,9. Dapat disimpulkan bahwa data ini uji lolos pada uji multikolinearitas.

### Hasil regresi Data Panel

Setelah menentukan model terbaik dalam penelitian, maka dapat diambil kesimpulan, bahwa *Fixed Effect Model* yang paling tepat. *Fixed Effect Model*

(FEM) merupakan teknik estimasi data panel dengan memakai variabel dummy untuk melihat adanya perbedaan *intercept* antar *cross section* (Basuki, 2015). Pendekatan model ini tidak memperhatikan dimensi waktu atau individu sehingga muncul asumsi bahwa perilaku data kabupaten/kota sama dalam berbagai kurun waktu.

**Tabel 5.5 . Least Square Fixed Effect**

Variabel Dependen:	Model
Pertumbuhan Ekonomi (Log(PDRB))	<i>Fixed Effect</i>
Konstanta	-11.7547
Standar Error	3.733742
T-Statistic	-3.14825
Probabilitas	0.0033



Lanjutan tabel 5.5

Variabel Dependen:	Model
<b>Pertumbuhan Ekonomi (Log(PDRB))</b>	<i>Fixed Effect</i>
<b>LOG(Pertanian)</b>	1.293301
Standar Error	0.276749
T-Statistic	4.673198
Probabilitas	0.0000
<b>LOG(Pariwisata)</b>	-0.10753
Standar Error	0.082978
T-Statistic	-1.29586
Probabilitas	0.2033
<b>LOG(Jalan)</b>	-0.070001
Standar Error	0.128672
T-Statistic	-0.544025
Probabilitas	0.5898
<b>LOG(PAD)</b>	0.264928
Standar Error	0.088793
T-Statistic	2.983645
Probabilitas	0.0051

Sumber: Lampiran, Data diolah

$$\text{LogPDRB}_{it} = \alpha + \beta_1 \text{Log(Pertanian)}_{it} + \beta_2 \text{Log(Pariwisata)}_{it} + \beta_3 \text{Log(PAD)}_{it} + \beta_4 \text{Log(Jalan)}_{it} + e_t$$

Hasil yang diperoleh adalah, sebagai berikut:

$$\text{LogPDRB} = \alpha + \beta_1 * \text{Log(Pertanian)} + \beta_2 * \text{Log(Pariwisata)} + \beta_3 * \text{Log(Jalan)} + \beta_4 * \text{Log(PAD)} + e_t$$

$$\text{LogPDRB} = -11,75474 + 1,293301 \text{Log(Pertanian)} - 0,107529 \text{Log (Pariwisata)} - 0,070001 \text{Log(jalan)} + 0,264928 \text{Log(PAD)} + e_t$$

Keterangan :

$\alpha$  = Nilai -11,75474 dapat diartikan bahwa apabila semua variabel independen (Pertanian, Pariwisata, PAD, Jalan) dianggap konstan atau tidak mengalami perubahan maka pertumbuhan ekonomi sebesar - 11,75474 persen.

$\beta_1$  = Nilai 1,293301 dapat diartikan bahwa ketika jumlah Pengeluaran

Pemerintah di sektor Pertanian naik sebesar 1 persen, maka

Pertumbuhan ekonomi mengalami kenaikan sebesar 1,293301

persen dengan asumsi faktor lain dianggap tetap.

$\beta_2$  = Nilai -0,107529 dapat diartikan bahwa ketika jumlah

Pengeluaran Pemerintah di sektor Pariwisata naik sebesar 1 persen,

maka, pertumbuhan ekonomi mengalami penurunan sebesar

0,107529 persen dengan asumsi faktor lain dianggap tetap.

$\beta_3$  = Nilai -0,070001 dapat diartikan bahwa ketika pengeluaran untuk sektor infrastruktur Jalan naik sebesar 1 persen, maka pertumbuhan ekonomi mengalami penurunan sebesar 0,070001 persen dengan asumsi faktor lain dianggap tetap.

$\beta_4$  = Nilai 0,264928 dapat diartikan bahwa ketika jumlah PAD naik

sebesar 1 persen maka, pertumbuhan ekonomi akan mengalami Kenaikan sebesar 0.264928 persen dengan asumsi faktor lain dianggap tetap. Hasil estimasi diatas, dapat disusun dalam model data panel dengan interpretasi sebagai berikut:

<i>Intercept</i> Bima	= -11,75474
- 0,258269	= -
12,013009	= -
<i>Intercept</i> Kota Bima	= -11,75474
- 0,837951	= -
12,592691	= -
<i>Intercept</i> Sumbawa	= -11,75474
- (-0,538769)	= -11,21597
<i>Intercept</i> Sumbawa Barat	= -11,75474
- (-0,247188)	= -11,50755
<i>Intercept</i> Mataram	= -11,75474
- (-0,123259)	= -11,63148
<i>Intercept</i> Lombok Tengah	= -11,75474
- 0,005297	= -11,76004
<i>Intercept</i> Lombok Timur	= -11,75474
- (-0,831466)	= -10,92327
<i>Intercept</i> Lombok Barat	= -11,75474
- 0,946291	= -12,70103

*Intercept* Lombok Utara = -11,75474  
- (-1,083726)

= -10,67101

*Intercept* Dompu = -11,75474

- 0,776601

= -12,53134

Estimasi diatas memperlihatkan hasil estimasi model *fixed effect* memiliki hasil yang berbeda-beda dari setiap kabupaten/kota, ini mengindikasikan bahwa model *fixed effect* diterima karena terdapat perbedaan *intercept* dan persamaan pada slopenya tetap sama antar kabupaten/kota dan waktu. *Intercept* yang digunakan dalam penelitian ini adalah Pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Sumbawa Barat.

## Uji Statistik

### 1. Koefisien Determinan (adjusted R<sup>2</sup>)

Hasil Regresi menggunakan *fixed effect*, dengan koefisien determinasi (R<sup>2</sup>) sebesar 0,781887. Hal ini menunjukkan bahwa secara statistic 78,19 persen total variasi dalam pertumbuhan ekonomi dipengaruhi oleh variabel bebas yakni pengeluaran pemerintah untuk sektor pertanian, pariwisata, infrastruktur jalan dan PAD. Sedangkan sisanya yaitu sebesar 2,04 persen dijelaskan oleh variabel diluar penelitian.

### 2. Uji Signifikasi Variabel Serempak (Uji F-statistik)

Hasil estimasi *Fixed Effect model* yang diperoleh nilai probabilitas F-statistik sebesar 0,00000 (signifikan pada  $\alpha$  5%), artinya secara keseluruhan variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen.

### 3. Uji T-statistik

**Tabel 5.7**  
Uji T-statistik

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-11.75474	3.733742	-3.148247	0.0033
LOG(PERTANIAN?)	1.293301	0.276749	4.673198	0.0000
LOG(PARIWISATA?)	-0.107529	0.082978	-1.295864	0.2033
LOG(JALAN?)	-0.070001	0.128672	-0.544025	0.5898
LOG(PAD?)	0.264928	0.088793	2.983645	0.0051

Sumber : Lampiran, data diolah

Variabel pengeluaran pemerintah terhadap sektor pertanian, koefisien sebesar 1.293301 dan probabilitas sebesar  $0.0000 < 0,05$  artinya variabel ini berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi NTB periode 2011-2015.

Kontribusi PDRB sektor pertanian setiap tahun selalu paling mendominasi dari pada sektor-sektor

lain di NTB periode 2011-2015. Selain itu, peningkatan PDRB NTB juga seiring dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat, dilihat dari penyerapan tenaga kerja di Nusa Tenggara Barat. Berdasarkan pada data tahun 2011 hingga 2015 jumlah tenaga kerja sektor pertanian paling banyak diantara sektor lainnya

**Tabel 5.8**  
Penyerapan Tenaga Kerja Menurut Lapangan Usaha  
di Nusa Tenggara Barat per Agustus (%)

Lapangan usaha utama	2011	2012	2013	2014	2015
Pertanian	44.44	44.25	45.29	43.13	93.01
Industri	8.64	8.5	8.05	8.89	9.38
Konstruksi	0	0	5.33	5.01	7.36
Perdagangan	18.87	18.83	18.88	20.2	21.58
Transportasi, Pergudangan & Komunikasi	0	0	3.55	3.9	3.28
Keuangan	0	0	1.52	1.4	1.14
Jasa Kemasyarakatan	14.97	16.05	15.62	15.51	16.47
Lainnya	13.07	12.37	1.76	1.97	1.77

Sumber: Statistik NTB, 2015

Penelitian ini seiring dengan hasil temuan Manoi, (2015). Menurutnya, upaya pengembangan

infrastruktur, sarana prasarana, *protect* lahan pertanian, penyediaan benih dan bibit unggul dapat memberikan hasil

produksi yang maksimal dan pemasaran hasil produksi yang menguntungkan bagi petani guna meningkatkan pendapatan petani.

Variabel pengeluaran pemerintah sektor pariwisata koefisien sebesar -0.107529 dan nilai probabilitas sebesar  $0.2033 > 0,05$  artinya variabel ini

berpengaruh negatif tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi NTB tahun 2011-2015. Hal ini terjadi karena adanya ketidakpadanan antara jumlah anggaran yang di keluarkan dengan jumlah target kunjungan wisatawan di Nusa Tenggara Barat periode 2011-2015

**Tabel 5.9.** Persentase Perbandingan Jumlah Anggaran dan Jumlah Kunjungan Pariwisata

Tahun	Kunjungan	%	Anggaran	%
	Wisatawan		Pariwisata	
			NTB	
2011	886,880		21,774,086,475	
2012	1,629,122	83.69	22,453,831,700	3.12
2013	1,357,602	-16.67	23,121,229,800	2.97
2014	1,629,122	20.00	49,272,739,500	113.11
2015	2,210,527	35.69	48,438,088,840	-1.7

Sumber: BPS NTB, data diolah

Berdasarkan tabel diatas, pada tahun 2011-2012 jumlah pengeluaran pemerintah untuk sektor pariwisata dinaikan sebesar 3,12 persen (anggaran 2011-2012) dan jumlah kunjungan pariwisata meningkat sebesar 83,69 persen (jumlah kunjungan 2011-2013). Pada tahun 2012-2013 jumlah pengeluaran pemerintah untuk sektor pariwisata dinaikan lagi sebesar 2,97 persen, akan tetapi jumlah kunjungan pariwisata turun mencapai 16,7 persen, artinya kontribusi PAD (pendapatan Asli Daerah) sektor pariwisata juga akan menurun dan begitu juga kontribusi PAD terhadap PDRB ikut menurun. Sedangkan pada tahun 2013-2014 pemerintah menambah jumlah pengeluaran pemerintah untuk sektor

pariwisata hingga 113 persen, akan tetapi kenaikan jumlah kunjungan pariwisata hanya meningkat 20 persen. Harapannya dinaikan anggaran juga dapat meningkatkan jumlah kunjungan lebih dari itu. Sehingga jika bercermin pada anggaran sebelumnya, besarnya jumlah anggaran kurang efektif dalam pengelokasiannya. Dengan menggunakan asumsi bahwa jika APBD (Anggaran Pemerintah dan Belanja Daerah) dialokasikan terlalu besar untuk sektor pariwisata, maka dapat mengurangi anggaran di sektor lain yang sebenarnya bisa lebih optimal. Hal ini mengakibatkan berkurangnya sumbangan sektor lain terhadap PDRB. Sedangkan pada tahun 2014-2015 jumlah anggaran pariwisata turun sebesar 1,7 persen,

justru jumlah kunjungan pariwisata naik sebesar 35,7 persen artinya PAD pariwisata juga akan meningkat dan menambah kontribusi terhadap PDRB, hal ini juga bisa disebabkan oleh adanya dampak belanja sektor tahun-tahun sebelumnya.

Variabel pengeluaran pemerintah sektor infrastruktur jalan dengan nilai koefisien sebesar -0.070001 dan probabilitas sebesar  $0.5898 > 0,05$  artinya variabel ini berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi NTB periode 2011-2015.

Hal ini disebabkan karena anggaran pembangunan infrastruktur NTB hanya fokus pada satu wilayah saja, yakni Lombok. sedangkan pembangunan infrastruktur di Sumbawa dilakukan belum secara maksimal. Dan persentase anggaran Pulau Lombok memperoleh anggaran sebesar 70 persen dan Sumbawa hanya memperoleh 30 persen, dana sebanyak itu hanya mampu digunakan untuk memperbaiki infrastuktur jalan Sumbawa. Anggaran tetap meningkat tetapi, tidak meratanya pembangunan menimbulkan ketimpangan pembangunan yang dapat memperlambat pertumbuhan ekonomi Sedangkan PDRB NTB bukan hanya dari pulau Lombok saja (LombokPost.com).

Penelitian ini memiliki hasil serupa dengan penelitian yang dilakukan oleh Hakim (2014) bahwa belanja modal infrastruktur jalan berpengaruh tidak signifikan dan negatif terhadap pertumbuhan ekonomi, menurutnya ini disebabkan belanja modal infrastruktur yang dilakukan terkadang memerlukan waktu lebih dari satu tahun untuk bisa

dimanfaatkan masyarakat luas. Selain itu adanya fenomena penumpukan pencairan realiasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sehingga dana-dana yang tersedia dalam jangka panjang tersimpan di kas daerah dan tidak dimanfaatkan secara optimal.

Variabel PAD dengan nilai koefisien sebesar 0.264928 dan probabilitas sebesar  $0.0051 < 0,05$  artinya variabel ini berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi NTB periode 2011-2015. Meningkatnya PAD, maka pemerintah memiliki kelebihan dana untuk meluaskan pengembangan daerah atau mengelola potensi daerah sehingga aktivitas perekonomian di Nusa Tenggara Barat akan menjadi lebih berkembang dan juga akan mencetak pertumbuhan ekonomi agar mencapai target. Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Rori, Luntungan, & Niode (2007) Menurutnya, penerimaan dari PAD dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah yang akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi nasional, tingginya nilai PAD akan mengoptimalkan aktivitas pada sektor-sektor yang berhubungan dengan indikator pertumbuhan ekonomi, selain itu manfaat lain dari peningkatan PAD adalah meningkatkan investasi pemerintah daerah yang mana dapat meningkatkan pelayanan publik.

## **KESIMPULAN DAN SARAN**

### **Kesimpulan**

1. Pengeluaran pemerintah untuk sektor pertanian berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Nusa Tenggara Barat

- menurut kabupaten/kota periode 2011-2015.
2. Pengeluaran pemerintah untuk sektor pariwisata berpengaruh tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Nusa Tenggara Barat menurut kabupaten/kota periode 2011-2015.
  3. Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Nusa Tenggara Barat menurut kabupaten/kota periode 2011-2015.
  4. Pengeluaran pemerintah untuk sektor infrastruktur jalan berpengaruh tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Nusa Tenggara Barat menurut kabupaten/kota periode 2011-2015.

#### **Saran**

1. Untuk terus dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui sektor pertanian maka, harus dibarangi dengan peningkatan fasilitas pertanian melalui peningkatan belanja untuk sektor pertanian. dan sektor pariwisata agar lebih efisien dalam menganggarkan dana pembangunan pariwisata. Begitu juga dengan sektor infrastruktur, pemerintah daerah agar lebih merata dalam menggunakan anggaran dalam artian pembangunan dilakukan sesuai dengan kebutuhan pembangunan daerah.
2. Untuk meningkatkan pendapatan asli daerah di Provinsi Nusa Tenggara Barat, semestinya diringi dengan perbaikan pelayanan kepada pihak-pihak yang menjadi objek pajak daerah yang ada, retribusi daerah dengan meningkatkan pelayanan kepada publik. Selain itu pemerintah daerah harus mulai memperhatikan efisiensi penggunaan anggaran untuk sektor-sektor yang memberikan kontribusi

besar dan sektor-sektor kontribusi kecil terhadap pertumbuhan ekonomi

3. Untuk penelitian selanjutnya, *time series* yang digunakan lebih panjang rentang waktunya. Agar dapat memberikan gambaran dan kesimpulan hasil penelitian lebih komprehensif. Dan juga menggunakan variabel yang lebih variatif.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Anitasari, M., & Soleh, A. (2015). Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Bengkulu. *jurnal Ekombis Review*, 2.
- Basuki, A. T., & Yuliadi, I. (2015). *Ekonomitrika : Teori & Aplikasi* (1 ed.). Yogyakarta: Mitra Pustaka Nurani (MATAN).
- Ahman, E., & Indiriani, E. 2007. *Membina Kompetensi Ekonomi*. Bandung: Grafindo Media Pratama.
- Boediono. (1988). *Teori Pertumbuhan Ekonomi* (4 ed.). Yogyakarta: BPFE.
- E. E. (2007). *Membina kompetensi Ekonomi*. Bandung: Grafindo Media Pratama.
- Hakim, L. 2014. "Pengaruh belanja modal terhadap pertumbuhan ekonomi (Studi Kasus Kabupaten dan Kota di Pulau Jawa dan Bali)". *Universitas Brawijaya, FEB, Jurnal Ilmiah*.
- Hermawan, B. (2012). Analisis Kontribusi Transaksi Pariwisata Terhadap PDB sektor Pariwisata. *Jurnal Sekolah Tinggi Pariwisata AMPTA, Yogyakarta*, 17.
- Ilham. 2017. "Wisata Halal Disebut Identik dengan NTB". Nasional.republika.co.id, 09 Juni 2017, <http://bit.ly/2ySZX2x>.

Diakses pada 10/20/2017, pukul 05.09 wib.

- Manoi, C. S. 2015. "pengaruh pengeluaran pemerintah terhadap pdrb sektor pertanian di provinsi Sulawesi Utara". *jurnal sosial ekonomi fakultas pertanian Universitas Sam Ratulangi Manado*.
- Prasetyo, R.B., & Firdaus, M. 2009. "Pengaruh Infrastruktur Pada Pertumbuhan Ekonomi Wilayah di Indonesia". *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Pembangunan*, 4.
- Rani, H. F. 2016. "Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah (PAD) (Studi Kasus di Kabupaten/Kota Eks-Karesidenan Pekalongan Periode 2005-2014)". *Jurnal Universitas Muhammadiyah Yogyakarta*, 5.
- Sukirno, S. (2004). *Makroekonomi* (3 ed.). 2011: PT RajaGrafindo Persada.
- \_\_\_\_\_.1996. *Makroekonomi : Pengantar Teori* (2 ed.), Jakarta. PT. RajaGrafindo Persada.
- Suparmoko. (2000). *Keuangan Negara* (5 ed.). Yogyakarta: BPFE.
- Susanto, H. 2014. "Analisis Kemampuan Keuangan Daerah Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat.". *Jurnal Organisasi dan Manajemen*, Volume 10, Nomor 1, Mataram.
- Taufiq, M., S, R. P., & Viphindartin, S. (2016). Pengaruh Pengeluaran Pemerintah di Sektor Pertanian Terhadap PDRB Sektor Pertanian di Wilayah EKS Karesidenan Besuki. *Jurusan Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan, Fakultas Ekonomi, Universitas Jember (UNEJ)*.
- Todaro. 2000. *Pembangunan Ekonomi: di Dunia Ketiga* (7 ed.). Jakarta: Erlangga.
- Jurnalis WartaNTB. 2017. "Inilah Program Prioritas Pembangunan Lombok Barat 2018". WartaNTB.com, 12 Oktober 2017 <http://bit.ly/2kNGhUu>. Diakses, 12/19/2017 pukul 14.00 wib.
- World Bank. 1994. *World Development Report: Infrastructure for Development*. Oxford University Press, New York